

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- A. M. Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Arus Timur. Makassar.
- , 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Kencana. Jakarta.
- Adji Samekto. 2015. *Hukum Lingkungan*. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
- Andrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asep Warlan Yusuf. 1997. *Pranata Pembangunan*. Universitas Parahyangan. Bandung.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press. Pamulang.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika. Jakarta.
- I Nyoman Gede Remaja. 2017. *Hukum Administrasi Negara Buku Ajar*. Fakultas Hukum Universitas Singaraja. Bali.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Josef Mario Monterio. 2017. *Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Setara Press. Malang.
- Laode M. Syarif *et.al.*. *Hukum Perizinan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. USAID, The Asia Foundation, Kemitraan.
- Masrudi Muchtar. 2015. *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Prestasi Pustaka Publisher. Banjarmasin.
- Moh. Fadli *et.al.*. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. UB Press. Malang.
- Muhammad Akib. 2012. *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daaeh*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad Erwin. 2015. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di*

- Indonesia Edisi Revisi (Cetakan Ke-empat)*. Reflika Aditama. Bandung.
- Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia (Cetakan Pertama)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- N.H.T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua)*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Nomensen Sinamon. 2010. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi (Cetakan ke-14)*. Kencana. Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika. Surabaya.
- Phillipus M. Hadjon et.al.. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Diatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum (Legal Argumentasi/Legal Reasoning) Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Raynaldo Sembiring et.al.. 2014. *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Edisi Pertama)*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Jakarta.
- Reda Rizal. 2016. *Studi Kelayakan Lingkungan (Amdal, UKL-UPL & SPPL) Edisi 3*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jakarta.
- Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara (Cetakan ke-13)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Setia. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum (Cetakan Ke-enam)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Th. G. Drupsteen. 1992. *Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan*. Fakultas Hukum UNAIR. Surabaya.

II. Jurnal

- A. M. Yunus Wahid. "Tata Ruang Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup". Artikel 11: Jurnal Clavia, Vol. 12 No. 2, Juni 2011 (ISSN 1411-349X).
- Andri Gunawan Wibisana. "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan DI Berbagai Negara". Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 No. 2 (2018): 222-255.
- Arya Rema Mubarak. "*Conflict of Interest* antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018". Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Dalila Adiba Yanuar Doman dan Ohiongyi Marino. "Kerangka Hukum Peran Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3K)". Lembar Informasi *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL).
- Edra Satmaidi. "Memfungsikan Izin Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". Jurnal anonim (tidak diketahui).
- H. Rhiti dan Y. Sri Pudyatmoko. "Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta". Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 2, Juni 2016.
- Helmi. "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2.
- ". "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup". Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1, Januari 2011.
- Margaretha Quina dan Angela Vania. "Perizinan Lingkungan Melalui *Online Single Submission*". Seri Lembar Informasi April 2019#1 *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL).
- Novianto Murti Hantoro. "*Omnibus Law*". Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Parliamentary Review Vol. III No 1, 2020.

Sumardi Kamarol Yakin. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan". *Badawai Law Journal*, Vol. 2, Issues 1, Maret 2007.

Supartoyo Wijoyo. "Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia". *Yuridika*: Volume 27 No. 2, Mei-Agustus 2012.

III. Karya Tulis Ilmiah Tidak Diterbitkan

Edra Satmaidi. 2015. *Konsep Hukum Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Terkait Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Disertasi. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Padjajaran. Bandung.

Ikomatussuniah. *Hukum Perizinan*. Bahan Ajar Hukum Perizinan. Universitas Tirtayasa. Tangerang.

Mar'ie Muhammad Setianegara. 2019. *Tumpang Tindih Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) Dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia*. Skripsi. Program Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

IV. Naskah Terbitan/Buku Tahunan Pemerintah/Lembaga Negara

- Andri Gunawan Wibisana. April 2020. Traction Energy Asia. Working Paper 4-2020: Catatan Kritis Atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup Dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 2020.
- Arya Sudjianto (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat PDL-UK). Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Dalam Program Keuangan Berkelanjutan Untuk PLT.
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). 2016. Police Brief: Paket Kebijakan Ekonomi & Simplikasi Regulasi Pusat-Daerah Dalam Mendukung Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
- Boedi Rheza *et. al.* (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah/KKPOD). 2019. Laporan Final KPPOD: Evaluasi Setahun Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 di Daerah.

- BPHN 16.21. 20 Januari 2020. Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja.
- Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad 2020 Kabinet Eksplorasi Makna. 2020. Catatan Kritis Omnibus Law Membedah RUU Cipta Kerja.
- Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. 2007. Panduan Pelingkupan Dalam Amdal.
- *Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)*. 6 Oktober 2020. Seri Analisis #3: Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam.
- *Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)*. 10 Desember 2020. Seri Analisis #5: Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik Dalam Amdal.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2007. Naskah Kebijakan KLHS.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Bogor, 27 Desember 2019. Bahan Rapat Terbatas: Omnibus Law (Cipta Lapangan Kerja).
- Luki Adrianto *et.al.* (Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI). 2015. Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Memahami Dokumen Lingkungan Hidup Sektor Energi Bersih: Buku Pedoman Untuk Lembaga Jasa Keuangan.
- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2009. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- PB8. Prosedur Penyusunan Amdal.
- USAID dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rangkuman Peraturan Menteri Mengenai Dokumen Lingkungan Hidup (Paket Pelatihan Keuangan Berkelanjutan Dalam Pembiayaan Energi Bersih).
- Wahyu Yun Santoso. www.researchgate.com. Anotasi Hukum UU Cipta Kerja di Aspek Lingkungan Hidup (Perubahan UU PPLH)

V. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7//MenLHK-II/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2018 tentang Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

VI. Internet

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Indeks Kemudahan Berbisnis.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Indeks_Kemudahan_Berbisnis)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Kerja_Sama_dan_Pembangunan_Ekonomi)

[https://legalo.id/2017/siup-vs-izin-prinsip.](https://legalo.id/2017/siup-vs-izin-prinsip)

[http://layanan.kominfo.go.id/faqs/76080863759d4cd149ac672004298453.](http://layanan.kominfo.go.id/faqs/76080863759d4cd149ac672004298453)

[http://oss.go.id.](http://oss.go.id)

[https://setkab.go.id/inilah-pokok-pokok-paket-kebijakan-ekonomi-xii/.](https://setkab.go.id/inilah-pokok-pokok-paket-kebijakan-ekonomi-xii/)

[https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-24-2018-pelayanan-peizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik.](https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-24-2018-pelayanan-peizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik)

[www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/paket-kebijakan-ekonomi-xvi-dilluncurkan/.](http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/paket-kebijakan-ekonomi-xvi-dilluncurkan/)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN Km. 10 MAKASSAR 90245

Tp : (0411) 587219, 584000, 584686, Fax : (0411) 587219, 584000, 584686 Email: fhuh@indosat.net.id

KETERANGAN PENELITIAN

No. 564 /RB-FH/IX/2020


Kepala Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan ini menerangkan Bahwa;

Nama : Muhammad Anwar
NIM : B11116405
PRODI : S1-LMU HUKUM
Departemen : S1-Hukum Administrasi Negara
Alamat : Jl. Buakana I No.13 Kel. Buakana Kec. Rappocini

Telah melakukan penelitian di Ruang Baca Fakultas Hukum Unhas, sehubungan dengan penyelesaian karya ilmiah yang berjudul:

Analisis yuridis penerapan online single submission (OSS) pada pengaturan perizinan lingkungan

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26/September/2020
Pustakawan,

Nurhidayah, S.Hum., M.M.
Nip. 196508061990032009

